

Katalog: 4601007.31



PROFIL **DEMOKRASI** PROVINSI DKI JAKARTA

2021



*BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA*



**PROFIL DEMOKRASI
PROVINSI DKI JAKARTA**

2021

PROFIL DEMOKRASI

PROVINSI DKI JAKARTA, 2021

No. ISBN	: -
No. Publikasi	: 31000.2255
Katalog BPS	: 4601007.31
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	: vi + 32 halaman
Naskah	: Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Penyunting	: Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Desain kover	: Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Diterbitkan oleh	: © Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Pencetak	: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini berisi data dan informasi yang terkait aspek, variabel, dan indikator IDI Provinsi DKI Jakarta. Publikasi ini merupakan publikasi yang keenam yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi yang terjadi di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Data yang disajikan terkait dengan aspek, variabel, indikator, serta perkembangan dan posisi IDI DKI Jakarta terhadap nasional. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau kajian dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan politik di DKI Jakarta.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi kebutuhan data statistik terkait demokrasi, baik oleh instansi pemerintah, swasta, kalangan akademisi, para pelaku politik, maupun masyarakat luas.

Jakarta, Desember 2022

BPS Provinsi DKI Jakarta
Kepala,



ANGGORO DWITJAHYONO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Manfaat	4
II. METODOLOGI	7
2.1. Urgensi Perubahan Metodologi IDI	8
2.2. Metode Penghitungan IDI	9
2.3. Aspek dan Indikator Penyusunan Metode IDI Baru	11
III. PROFIL DEMOKRASI JAKARTA	17
3.1. Capaian IDI Menurut Aspek	20
3.2. Capaian Indeks Aspek Kebebasan	21
3.3. Capaian Indeks Aspek Kesetaraan	23
3.4. Capaian Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	24
3.5. Capaian Indikator-indikator IDI	26
IV. PENUTUP	31

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Anggoro Dwitjahyono
Penanggungjawab Teknis	: Dwi Paramita Dewi
Editor	: Dwi Paramita Dewi
Penulis	: Theresia Parwati
Pengolah Data	: Theresia Parwati
<i>Layout</i>	: Nurhani Restu Umi
Gambar Kulit	: Dimas Hafizh

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

Dalam konteks demokrasi, efektifitas pembangunan semestinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku perencana sekaligus eksekutor pembangunan, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai elemen penting yang secara langsung ataupun tidak langsung berperan sebagai unsur penting dari suksesnya pembangunan itu sendiri. Efektifitas pembangunan menuntut komitmen pemerintah dan kesediaan masyarakat untuk melaksanakan dan mengawal pembangunan sesuai dengan tujuan negara, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat bisa terjalin jika setiap elemen tersebut memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, diperlukan adanya kepercayaan yang kuat antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Keberadaan Jakarta sebagai ibukota negara merupakan barometer dan refleksi dari bangsa Indonesia yang multi etnik, multi agama, multi ras, dan multi golongan dan kepentingan menjadikannya sangat rentan terhadap konflik. Perlu ada upaya *extra-ordinary* untuk menjaga kebhinekaan ini. Menjaga kondusivitas demokrasi adalah salah satu upaya yang diperlukan untuk memastikan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itulah diperlukan suatu indikator untuk melihat bagaimana perkembangan dan permasalahan demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh Indonesia berdasarkan beberapa aspek demokrasi. Ditingkat pusat, IDI merupakan usaha bersama yang melibatkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan United Nation Development Programme (UNDP).

1.1. LATAR BELAKANG

Pengertian demokrasi menurut Robert Dahl (2001) adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Demokrasi sejati dimaknai sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". merupakan ilmuwan yang merumuskan tatanan politik yang disebutnya poliarki (*polyarchy*), suatu istilah yang dipakainya untuk menyebut 'demokrasi'. Tatanan politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu : (1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi, oposisi yang dimungkinkan dan (2) seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.

Mengukur perkembangan demokrasi bukan pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi, sehingga mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi yang datanya akan dikumpulkan. Untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi, disusun sebuah indikator yakni IDI.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 mengalami perubahan karena terdapat perubahan konsep demokrasi yang digunakan. Konsep yang digunakan pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada tahun 2020 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan

nasional, sementara Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 menghasilkan indeks tingkat provinsi, pusat, dan nasional.

1.2. TUJUAN

IDI disusun dengan tujuan:

1. Mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi karena selama ini perkembangan demokrasi hanya diukur secara kualitatif berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas
2. Mengukur perkembangan demokrasi
3. Memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi

1.3. MANFAAT

1. Dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi.
2. Membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah pusat secara umum dan pemerintah daerah secara khusus.
3. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah

untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang.

<https://jakarta.bps.go.id>

<https://jakarta.bps.go.id>

BABII METODOLOGI

2.1. URGENSI REVISI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2021

Kajian terhadap revisi IDI telah dimulai oleh Bappenas sejak tahun 2018. Kajian ini merupakan respon dari berbagai masukan lembaga pemerintah maupun masyarakat. Revisi IDI dilakukan dengan kolaborasi tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU *Research Institute*, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Hasil kajian tersebut menghasilkan perubahan landasan teoritis serta metode pengumpulan data dan penghitungan.

Urgensi revisi IDI berdasarkan kajian tersebut memuat empat hal, yaitu:

1. IDI perlu memiliki basis teoritik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia, sehingga IDI tidak hanya sekedar instrumen pengukuran dan penilaian demokrasi Indonesia, tetapi juga harus didorong sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Diperlukan pengukuran IDI di tingkat pusat bukan hanya tingkat provinsi untuk menjamin Indeks Demokrasi Indonesia yang komprehensif. Pada IDI metode lama tidak dilakukan pengumpulan data berbagai indikator tingkat pusat untuk menghasilkan skor di tingkat pusat.
3. Konsep demokrasi dalam IDI metode lama masih dipahami terbatas pada dimensi politik saja. Konteks demokrasi berdasarkan pengalaman negara-negara pasca-otoritarianisme seperti halnya Indonesia perlu melihat demokrasi

dalam berbagai dimensi yang lebih luas termasuk ekonomi dan sosial masyarakat.

4. Diperlukan perubahan pada beberapa indikator IDI yang sudah kurang sensitif dalam menangkap dinamika demokrasi dan perbaikan metodologi penghitungan agar secara statistik lebih tepat seperti bobot, penghitungan skor, dan agregasi indeks.

Sepanjang 2019-2021 kajian tersebut dioperasionalkan oleh Bappenas dan BPS, untuk melakukan finalisasi indikator, memastikan ketersediaan data, serta merumuskan formula penghitungan. Proses ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi yang terkait langsung dengan pemanfaatan IDI.

2.2. METODE PENGHITUNGAN IDI

Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain.

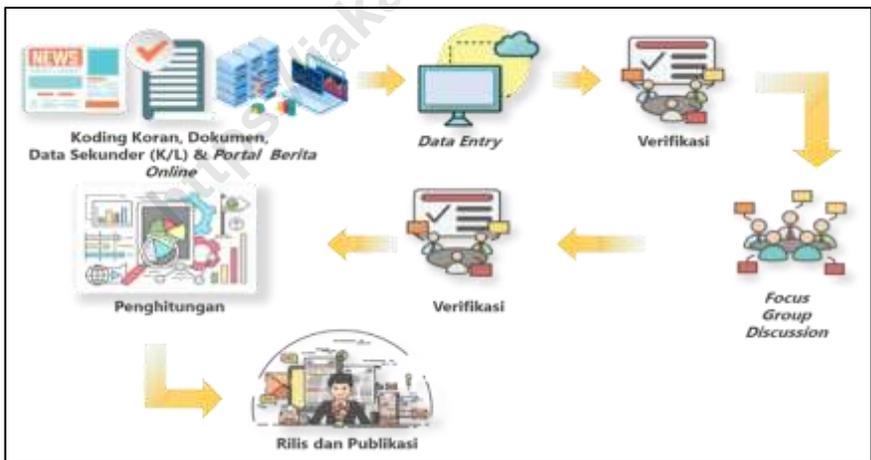
Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak, data dokumen, serta portal berita *online*. Data tersebut nantinya akan divalidasi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan ahli yang relevan.

Sumber data IDI metode baru yakni: (1) Surat kabar. Surat kabar yang digunakan adalah yang memiliki oplah terbesar atau jangkauan

terluas di masing-masing provinsi. (2) Dokumen. Dokumen berupa UU, Perda, Pergub, Surat Edaran, data Komnas HAM, data sekunder maupun indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, dll. (3) *Web scraping* pada tujuh portal berita *online* yaitu detik.com, kompas.com, antara.com, tirto.id, kumparan.com, jpnn.com, dan tribunnews.com. (4) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan untuk mengonfirmasi dan menambah informasi dari tokoh yang relevan.

Bobot aspek dan indikator IDI diperoleh dari AHP yang dilakukan dengan mengundang 20 Juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, LSM, serta pers. Bobot ini yang menentukan kontribusi indikator terhadap aspek.

Gambar 1. Skema penyusunan IDI metode baru



Pada tahap pertama dilakukan penghitungan IDI pada 34 Provinsi. Penghitungan dilakukan secara berjenjang dari skor 22 indikator, kemudian indeks dari tiga aspek, dan terakhir IDI Provinsi. Pada tahap selanjutnya dilakukan penghitungan IDI pusat. Penghitungan ini dilakukan dari 14 indikator, karena tidak semua (22

indikator) memungkinkan dihitung di tingkat pusat. Pada tahap akhir dilakukan penghitungan IDI nasional dengan merata-rata nilai aspek nasional. Bobot yang digunakan dalam agregasi aspek nasional sebesar 0,61 untuk provinsi dan 0,39 untuk pusat. Komposisi ini diambil berdasarkan jumlah indikator penyusun IDI provinsi dan pusat.

Koran yang digunakan adalah koran dengan oplah terbesar yang ada di sebuah provinsi. Pengecualian jika koran tersebut memiliki segmen yang spesifik (misal ekonomi, atau kriminalitas) sehingga tidak banyak memuat berita-berita yang bersifat umum. Untuk data provinsi akan dikumpulkan oleh personel BPS Provinsi, sementara untuk data pusat dan nasional akan dikumpulkan oleh Fungsi Statistik Politik dan Keamanan di BPS RI. Dalam pengumpulan data BPS dibantu oleh Pokja IDI provinsi, yaitu lembaga yang berisikan instansi terkait data IDI, akademisi, jurnalis, serta organisasi kemasyarakatan. Dalam proses verifikasi, jika tim BPS membutuhkan pandangan dari pihak lain akan mengundang penghasil data, atau pakar dalam bidang terkait.

2.3. ASPEK DAN INDIKATOR PENYUSUN IDI METODE BARU

Kebebasan

Proses sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri.

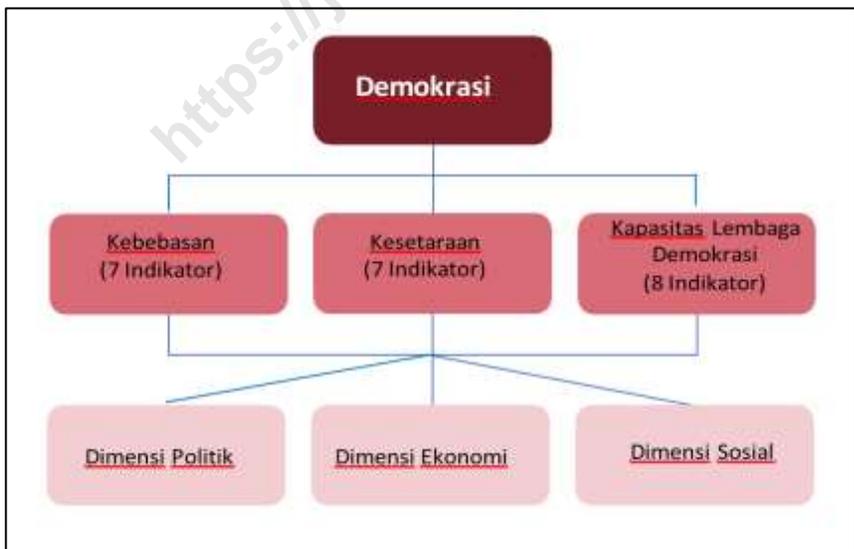
Kesetaraan

Proses sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi yang setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan.

Kapasitas Lembaga Demokrasi

Proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin kebebasan dan kesetaraan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik dan lembaga independen seperti penyelenggara pemilu di pusat dan daerah.

Gambar 2. Aspek dan Indikator Penyusun IDI metode baru



Tabel 1 Daftar Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia, 2021

ASPEK KEBEBASAN	
Indikator	Sumber Data
1 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapatoleh aparat negara	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD
2 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapatantar masyarakat	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD
3 Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD
4 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Peraturan Pemerintah Daerah Komnas HAM
5 Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Bawaslu
6 Pemenuhan hak-hak pekerja	Sakernas BPS
7 Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Dewan Pers
ASPEK KESETARAAN	
Indikator	Sumber Data
8 Kesetaraan gender	BPS
9 Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Sekretariat DPRD Provinsi Sekretariat DPR dan DPD Koran Portal Berita Online
10 Anti monopoli sumber daya ekonomi	KPPU
11 Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Susenas BPS
12 Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	Sakernas BPS
13 Akses masyarakat terhadap informasi publik	Komisi Informasi Pusat
14 Kesetaraan dalam pelayanan dasar	BPS

ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

Indikator	Sumber Data
15 Kinerja lembaga legislatif	Sekretariat DPRD Provinsi
16 Kinerja lembaga yudikatif	Sekretariat DPR RI Mahkamah Agung Mahkamah Konsitusi
17 Netralitas penyelenggara pemilu	Bawaslu/DKPP
18 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	PTUN
19 Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	KLHK
20 Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	Situs Pemerintah Daerah Situs Kementerian Keuangan
21 Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Kementerian PANRB
22 Pendidikan politik pada kader partai politik	Partai Politik Bakesbangpol Surat Kabar Portal Berita Online

Tim Koordinasi IDI Pusat

Pengumpulan data IDI diorganisir oleh tim koordinasi IDI pusat yang dipimpin Kemenkopolkam dengan anggota BPS, Bappenas, dan Kemendagri. Tim ini yang melakukan koordinasi dalam pengumpulan data yang dimiliki oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat untuk kemudian datanya dikelola oleh BPS. Tim ini juga melakukan verifikasi data yang akan dihitung dalam IDI.

Dalam ranah pemanfaatan data IDI, tim ini juga berbagi peran dalam menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari penghitungan IDI. Tindak lanjut tersebut berupa koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah yang terkait langsung dengan hasil IDI, maupun melakukan sosialisasi dalam rangka penguatan demokrasi.

Pokja IDI Provinsi

Pada tingkat provinsi tim yang mengemban peran serupa dengan tim koordinasi IDI pusat disebut kelompok kerja (Pokja) IDI Provinsi. Secara nasional Pokja IDI dikoordinir oleh Kemendagri. Pokja akan diketuai oleh sekdaprov dengan beranggotakan dinas yang terkait IDI, BPS, Kantor Perwakilan Komnas HAM, Komisi Informasi Provinsi, LMS, perguruan tinggi, serta pers. Masa keanggotaan pokja IDI metode baru mengikuti jabatan gubernur agar selaras dengan RPJMD pada bidang politik dan demokrasi.

Pada pegumpulan data pokja membantu mengakses data-data pemerintah seperti transparansi anggaran, pendidikan politik, serta data DPRD. Sebagaimana di pusat, data yang diperoleh melalui pokja akan dikelola oleh BPS Provinsi. Dalam ranah pemanfaatan, pokja IDI provinsi juga mengemban amanat untuk melakukan koordinasi pada dinas/pihak terkait berdasarkan hasil IDI, serta melakukan sosialisasi dalam rangka penguatan demokrasi.

<https://jakarta.bps.go.id>

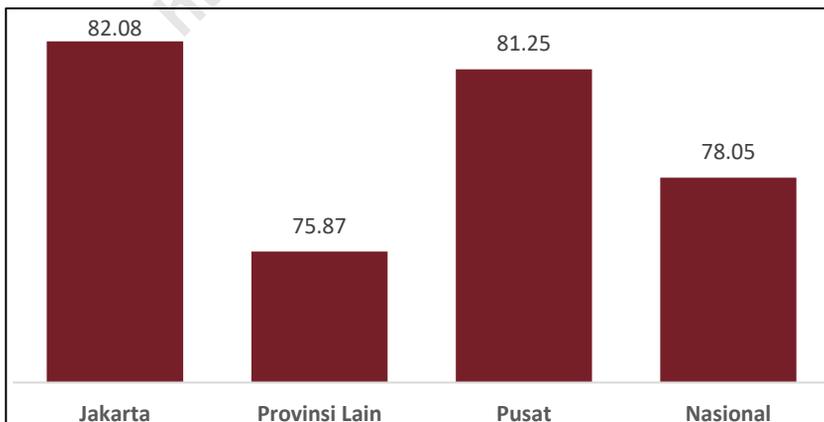
<https://jakarta.bps.go.id>

BAB III POTRET DEMOKRASI JAKARTA

Keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan magnitudo sendiri dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Kondisi demokrasi Jakarta berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) saat ini sudah sangat baik. Beberapa kali Jakarta mendudukkan posisinya sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Meminjam istilah Habermas, Jakarta juga sudah berhasil menciptakan ruang publik yang mumpuni untuk menciptakan situasi yang kondusif.

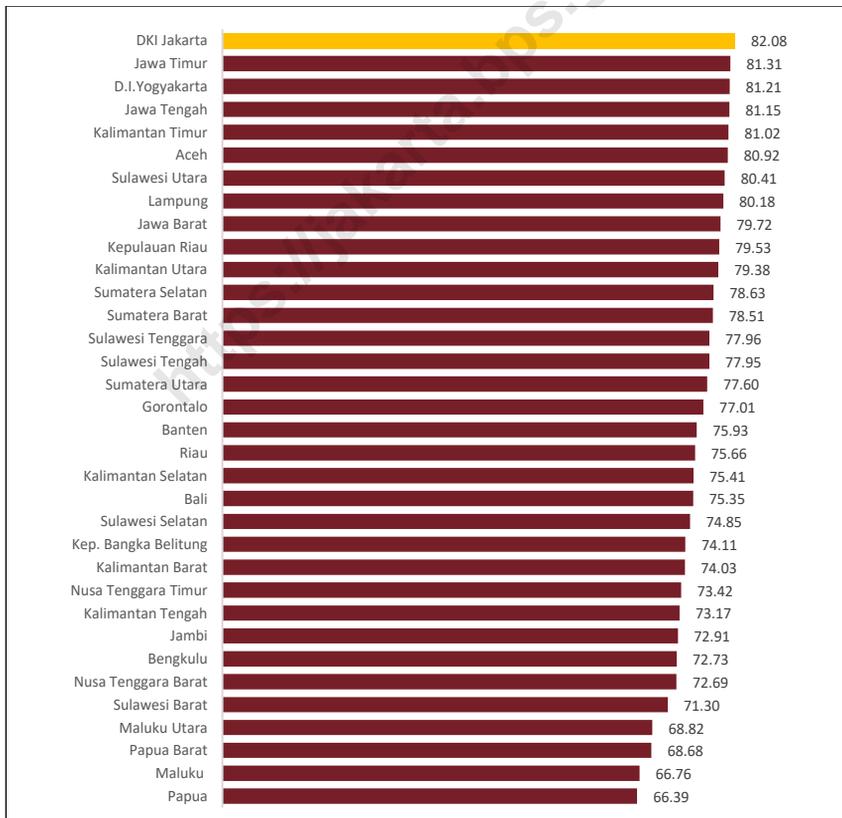
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan demokrasi lokal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2021. Angka IDI yang digunakan dalam penulisan ini adalah angka IDI dari hasil metode baru. Metode yang digunakan adalah, studi pustaka (*library research*), *content analysis* terhadap berita di surat kabar dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, dan *Focus Group Discussion*.

Gambar 3. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia, 2021



Hasil kajian menunjukkan capaian indeks demokrasi Propinsi DKI Jakarta dengan metode baru, masih menempati posisi tertinggi dibandingkan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2021 skor indeks demokrasi Propinsi DKI mencapai 82,08, dari skala 0-100 atau dapat dikategorikan sebagai propinsi dengan “kinerja demokrasi baik”. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap nilai indeks dan akan dikupas lebih lanjut.

Gambar 4. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2021

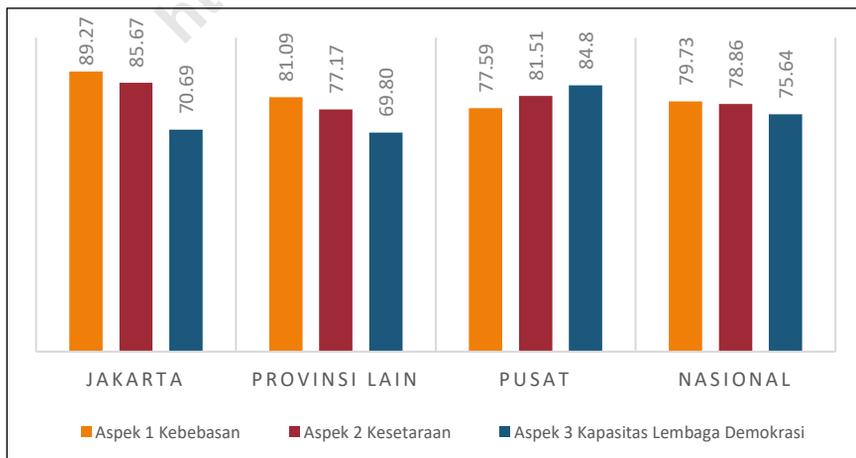


3.1. CAPAIAN IDI MENURUT ASPEK

Capaian IDI Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian provinsi lain di Indonesia dan bahkan capaian secara nasional. Secara umum, capaian IDI tingkat provinsi dan Nasional memiliki pola yang sama. Capaian tertinggi ada pada aspek kebebasan, diikuti aspek kesetaraan dan terakhir aspek kapasitas Lembaga demokrasi. Pola sebaliknya terjadi pada capaian IDI tingkat pusat dimana capaian aspek kapasitas lembaga demokrasi paling tinggi diikuti capaian aspek kesetaraan dan terakhir aspek kebebasan.

Besaran indeks IDI Jakarta pada tahun 2021 ini adalah 82,08. Angka ini merupakan indeks komposit atau gabungan dari skor 3 aspek IDI yaitu aspek kebebasan dengan nilai 89,27; aspek kesetaraan 85,67; dan aspek lembaga demokrasi 70,69.

Gambar 5. Capaian Indeks Aspek IDI, 2021



Capaian indeks aspek kebebasan dan kesetaraan untuk DKI Jakarta (89,27 dan 85,67) adalah yang paling tinggi dibandingkan capaian provinsi lain (81,09 dan 77,17) capaian tingkat pusat (77,59 dan 81,51) dan bahkan capaian nasional (79,73 dan 78,86). Namun tidak dengan indeks aspek kapasitas lembaga demokrasi. Nilai indeks ini untuk Jakarta (70,69) sedikit lebih tinggi dibandingkan propinsi lain (69,8) tetapi lebih rendah dibandingkan capaian tingkat pusat (84,8) dan nasional (75,64).

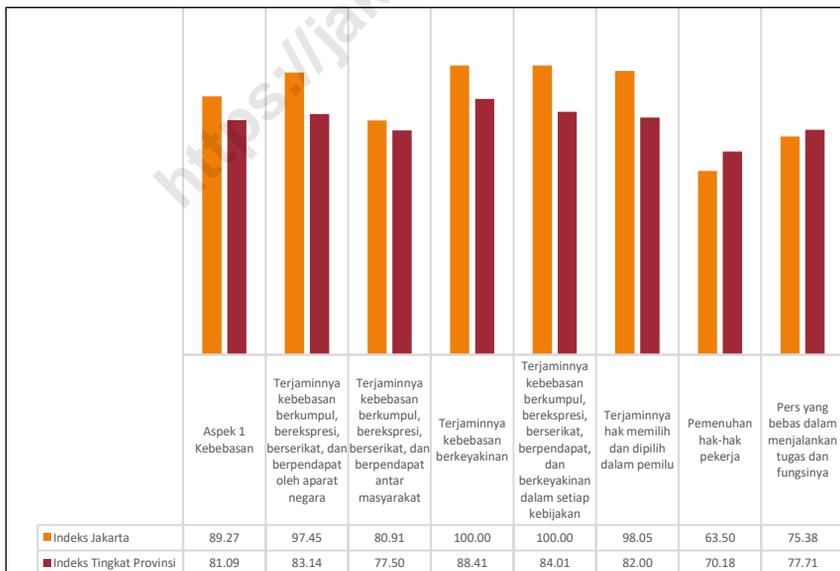
3.2. CAPAIAN INDEKS ASPEK KEBEBASAN

Indeks aspek kebebasan dibangun melalui tiga (3) dimensi politik (4 indikator), dimensi sosial (1 indikator) dan dimensi ekonomi (1 indikator). Keempat indikator pada dimensi politik yakni indikator 1 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat Negara); indikator 2 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat); dan indikator 4 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan). Kemudian, jaminan pada hak pilih juga diukur pada indikator 5 (terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu). Pada dimensi sosial bisa dilihat pada indikator 3 (terjaminnya kebebasan berkeyakinan), yang mengukur sejauh mana jaminan setiap umat untuk memilih agama, keyakinan, dan menjalankan ibadahnya. Selanjutnya, dimensi ekonomi diwakili Indikator 6 (pemenuhan hak-hak pekerja), indikator ini akan menggambarkan sejauh mana warga negara (pekerja) bebas dari eksploitasi dalam sektor ekonomi.

Jika dilihat dari gambar 8, capaian seluruh komponen pembentuk indeks aspek kebebasan di Jakarta lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian indeks di propinsi lain kecuali untuk indikator pemenuhan hak-hak pekerja, capaian Jakarta hanya sebesar 63,50 atau 6,68 poin lebih rendah dibandingkan capaian propinsi lain (70,18). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan sosial bagi pekerja melalui pemberian jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun pada pekerja di DKI Jakarta masih belum maksimal. Padahal berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Termasuk didalamnya jaminan sosial untuk pekerja.

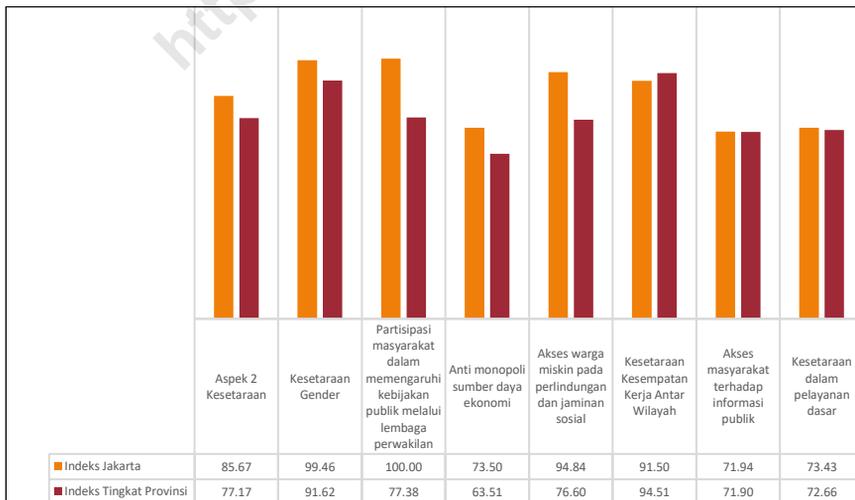
Gambar 6. Capaian Aspek Kebebasan di DKI Jakarta, 2021



3.3. CAPAIAN INDEKS ASPEK KESETARAAN

Aspek Kesetaraan mengukur sejauh mana seluruh komponen masyarakat dapat memiliki akses yang setara pada sumber daya di berbagai sektor serta dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya. Aspek ini diukur dengan tujuh indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu: Indikator 8 (kesetaraan gender); Indikator 9 (partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan); Indikator 10 (anti monopoli sumber daya ekonomi); Indikator 11 (akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial); Indikator 12 (kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah); Indikator 13 (akses masyarakat terhadap informasi publik); dan Indikator 14 (kesetaraan dalam pelayanan dasar).

Gambar 7. Capaian Aspek Kesetaraan di DKI Jakarta, 2021



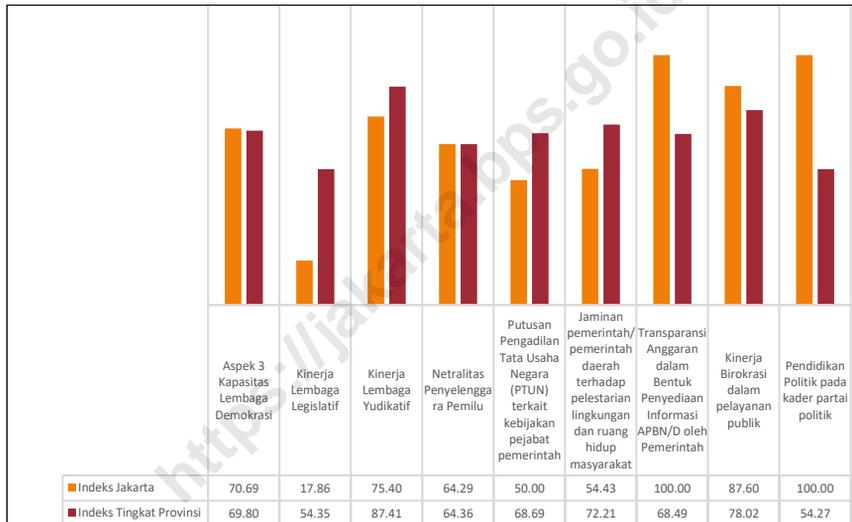
Berdasarkan gambar 7 dapat dilihat bahwa seluruh indikator yang membentuk aspek kesetaraan di DKI Jakarta hampir seluruhnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata indikator pada provinsi lain di Indonesia kecuali nilai indikator 12 (kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah) yang nilainya sedikit dibawah rata-rata indeks tingkat provinsi. Nilai indikator 9 (partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan) bahkan sangat sempurna. Artinya antusiasme dan partisipasi masyarakat di Jakarta untuk mengawal pelaksanaan kebijakan publiknya sangatlah tinggi. Tidaklah mengherankan, karena magnitudo politik Jakarta sangat besar dan membuat masyarakat mau tidak mau peduli terhadap berbagai urusan negara.

3.4. CAPAIAN INDEKS ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

Baik buruknya demokrasi sangat bergantung pada kapasitas lembaga demokrasinya. Asepek ini mengukur kapasitas dan peran beberapa lembaga negara diantaranya lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, partai politik, dan birokrasi. Aspek kapasitas lembaga demokrasi diukur melalui delapan (8) indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu: indikator 15 (Kinerja Lembaga Legislatif); indikator 16 (Kinerja Lembaga Yudikatif); indikator 17 (Netralitas Penyelenggara Pemilu); indikator 18 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah); indikator 19 (Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat); indikator 20 (Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah); indikator 21 (Kinerja birokrasi dalam

pelayanan publik); dan indikator 22 (Pendidikan politik pada kader partai politik).

Gambar 8. Capaian Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi di DKI Jakarta, 2021



Capaian indeks aspek kapasitas lembaga demokrasi untuk Jakarta (70,69) sedikit lebih tinggi dibandingkan indeks tingkat provinsi (69,80). Capaian indikator 20 (transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah) dan indikator 22 (Pendidikan politik pada kader partai politik) keduanya bernilai 100 yang berarti pelaksanaannya sudah sangat baik. Namun demikian, masih ada 3 indikator yang berkategori kinerja buruk yakni indikator 15 (kinerja lembaga legislatif) bernilai 17,86, indikator 18 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait

kebijakan pejabat pemerintah sebesar 50,00 dan indikator 19 (jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat) sebesar 54,43.

3.5. CAPAIAN INDIKATOR IDI

Angka IDI dibangun oleh 22 indikator yang tersebar kedalam 3 aspek. Dari 22 indikator pada angka IDI DKI Jakarta terdapat 12 yang mencapai kinerja kategori "tinggi" (skor di atas 80), 6 indikator berkinerja "sedang" (skor antara 60-80) dan 4 indikator berkategori "rendah" (skor dibawah 60).

<https://jakarta.bps.go.id>

Tabel 1. Capaian IDI Tahun 2021

Deskripsi		Capaian	Provinsi	Pusat	Nasional	Kategori
IDI Komposit		82,08	75,87	81,25	78,05	TINGGI
Aspek 1	Kebebasan	89,27	81,09	77,59	79,73	TINGGI
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	97,45	83,14	47,13	-	TINGGI
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	80,91	77,50	-	-	TINGGI
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100,00	88,41	100	-	TINGGI
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100,00	84,01	89,66	-	TINGGI
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	98,05	82,00	-	-	TINGGI
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	63,50	70,18	-	-	RENDAH
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	75,38	77,71	72,11	-	SEDANG
Aspek 2	Kesetaraan	85,67	77,17	81,51	78,86	TINGGI
8	Kesetaraan Gender	99,46	91,62	100	-	TINGGI
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00	77,38	76,1	-	TINGGI
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,50	63,51	-	-	SEDANG
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	94,84	76,60	-	-	TINGGI
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	91,50	94,51	-	-	TINGGI
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	71,94	71,90	69,84	-	SEDANG
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	73,43	72,66	-	-	SEDANG
Aspek 3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	70,69	69,80	84,8	75,64	SEDANG
15	Kinerja Lembaga Legislatif	17,86	54,35	33,33	-	RENDAH
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	75,40	87,41	99,1	-	SEDANG
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	64,29	64,36	91,67	-	SEDANG
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	50,00	68,69	81,03	-	RENDAH
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	54,43	72,21	-	-	RENDAH
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00	68,49	100	-	TINGGI
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	87,60	78,02	80	-	TINGGI
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	100,00	54,27	100	-	TINGGI

Kedua belas indikator yang memiliki kategori “tinggi” yakni indikator 1 (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara), indikator 2 (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat), indikator 3 (Terjaminnya kebebasan berkeyakinan), indikator 4 (Terjaminnya kebebasan

berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan), indikator 5 (Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat), indikator 8 (Kesetaraan gender), indikator 9 (Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan), indikator 11 (Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial), indikator 12 (Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah), indikator 20 (Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah), indikator 21 (Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik), dan indikator 22 (Pendidikan politik pada kader partai politik).

Sebanyak 6 indikator berkategori "sedang" (skor antara 60-80) yakni indikator 7 (Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya), indikator 10 (Anti monopoli sumber daya ekonomi), indikator 13 (Akses masyarakat terhadap informasi publik), indikator 14 (Kesetaraan dalam pelayanan dasar), indikator 16 (Kinerja Lembaga Yudikatif) dan indikator 17 (Netralitas Penyelenggara Pemilu). Sedangkan 4 indikator lainnya berkategori "rendah" (skor dibawah 60). Indikator tersebut adalah indikator 6 (Pemenuhan hak-hak pekerja), indikator 15 (Kinerja Lembaga Legislatif), indikator 18 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah) dan indikator 19 (Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat).

Gambar 9. Capaian Indikator IDI, 2021



<https://jakarta.bps.go.id>

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah DKI Jakarta dapat melihat berbagai persoalan yang ada pada data IDI 2021 sebagai acuan program penguatan demokrasi. Sekalipun capaian IDI Jakarta tahun 2021 ini adalah yang tertinggi dibandingkan ke-34 provinsi lain di Indonesia, namun demikian masih ada Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dituntaskan. Pada aspek kebebasan, masih ada "PR" terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi masih ada "PR" terkait kinerja lembaga legislatif, keputusan pejabat pemerintah yang di PTUN-kan, dan jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang politik tidak hanya dipengaruhi oleh peran pemerintah semata, tetapi merupakan keberhasilan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku politik. Oleh karena itu dalam rangka memajukan keberhasilan pembangunan politik terutama untuk meningkatkan demokrasi di DKI Jakarta dibutuhkan peran aktif dari semua pihak yang terkait. Kinerja masing-masing harus terus ditingkatkan di masa yang akan datang, dan harus terus bersinergi demi tercapainya demokrasi yang lebih baik lagi.

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan demokrasi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan politik. Melalui kelompok kerja (POKJA) IDI DKI Jakarta diharapkan segala permasalahan dalam pengumpulan data IDI dapat teratasi, sehingga dapat menghasilkan angka Indeks Demokrasi Indonesia yang merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Jl. Salemba Tengah No 36-38 Jakarta 10440
Telp: (021) 31928493
Homepage: <http://www.Jakarta.bps.go.id>